

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan paling banyak bekerja dan menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Oleh karena itu pembangunan pada sektor pertanian sangat perlu digalakkan baik oleh pemerintah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada (Siagian et al., 2022). Dari pembangunan sektor pertanian diharapkan akan menjadi media atau perantara penggerak bagi perkembangan pembangunan bidang lainnya, termasuk pada bidang pembangunan ekonomi (Basri & 2024, 1). Dengan demikian dari sektor pertanian sangat berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat petani (C. Puspitasari et al., 2024).

Desa Gonggang yang terletak di Kabupaten Magetan memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 422 orang. Data ini mencerminkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat di desa tersebut yang masih berada di bawah garis kemiskinan (Hasdiana, 2018). Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan akan perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk mengembangkan program-program untuk masyarakat, peningkatan akses peluang ekonomi yang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Gonggang (Setiadi & Pradana, 2022).

Sebagai salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan, program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dapat diterapkan di Desa Gonggang. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian (Sholikhah & Pranata, 2024). Adapun beberapa dasar hukum dari program PKTD (Yoshua Pangalayo Paraya et al., 2022).

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk memberikan

tambahan pendapatan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 1 angka 15, PKTD didefinisikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa, tetapi juga untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat

Tabel 1. 1 Dasar Hukum Program PKTD

Dasar Hukum	Isi / Pokok Pengaturan
UU Desa (Pasal 22)	Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
PP No. 43/2014 (Pasal 127)	Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan: mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan secara swakelola oleh Desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama antar desa dan pihak ketiga, memprioritaskan potensi lokal.
Permendagri No.114/2014	RKP Desa harus mengedepankan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan padat karya tunai di desa.
Perpres 54/2010 s.d. Perpres 4/2015	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Lembaga termasuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
Perka LKPP No. 13/2013 junto No. 22/2015	Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan sumber daya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
PMK 50/PMK.07/2017 junto PMK 112/PMK.07/2017	Kegiatan Dana Desa dilakukan secara swakelola, menyerap tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku lokal.
PMK 168/PMK.05/2015	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L.

junto PMK 173/PMK.05/2016	
Arahan Presiden	Penciptaan lapangan kerja di Desa dioptimalkan dengan padat karya, cash for work, dan swakelola.
SKB 4 Menteri	Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa.

*Sumber: Kemenko PMK*

Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas sarana pendukung sektor pertanian, seperti irigasi, jalan tani, atau gudang penyimpanan hasil panen, tetapi juga memberikan lapangan kerja sementara bagi masyarakat miskin di desa tersebut (Prihatini et al., 2024). Melalui PKTD, masyarakat dapat terlibat langsung sebagai tenaga kerja dalam proyek-proyek pembangunan, sehingga mendapatkan penghasilan tambahan sekaligus memperkuat infrastruktur yang dapat mendukung produktivitas pertanian jangka panjang (Setiawan & Megawati, 2022). Dengan demikian, diharapkan program ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gonggang (Harivarman, 2022).

Namun permasalahan yang sering kali muncul adalah banyak program yang dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi masyarakat, dengan contoh seperti memperbaiki infrastruktur, atau mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (Febriansyah et al., 2023). Namun, kenyataannya, tidak semua program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan (Hidayat et al., 2022). Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat (Wulan et al., 2019). Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk partisipasi aktif, tetapi juga mencakup penerimaan, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program (Aprilia & Ermayanti Susilo, 2021).

Ketika masyarakat tidak merasa terlibat atau tidak memahami manfaat program, muncul resistensi atau ketidakpedulian yang berujung pada kegagalan implementasi (Haryono et al., 2022). Hal ini sering kali disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya sosialisasi, atau perbedaan prioritas antara apa yang dianggap

penting oleh pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat (Budiasa et al., 2019). Kondisi ini menciptakan sebuah permasalahan yang cukup mendalam(Haryono et al., 2022).

Maka dari itu diharapkan Pemerintah desa memiliki peranan dalam menggerakkan perekonomian lokal, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian (Firdausi, 2020). Dengan kebijakan dan program yang tepat, pemerintah desa dapat membantu meningkatkan perekonomian melalui sebuah pemberdayaan melalui program PKTD (Padat Karya Tunai Desa)(Kusumaningrum, 2019).

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) telah dilaksanakan sejak tahun 2018 di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia (Lestari et al., 2020). Program ini merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa (Ariyanto & Wibowo, 2019). PKTD merupakan program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya beli (Karmila, Alimuddin Said, 2021). Program ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga, dan teknologi lokal(Lepa et al., 2019). Beberapa contoh kegiatan PKTD antara lain.

1. Pembangunan talud jalan usaha tani
2. Normalisasi irigasi pertanian
3. Pemeliharaan saluran air
4. Pemeliharaan taman lingkungan
5. Pemeliharaan jalan setapak
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

Pemerintah melakukan perubahan terhadap paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menjadi merata secara adil dan berimbang (Aldama et al., 2021). Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan nasional juga merencanakan berbagai program dan salah satu dari program itu adalah Padat Karya Tunai Desa atau PKTD (Herdiyana, 2019). Program ini merupakan salah satu program yang di prioritaskan oleh

pemerintah dalam menyalurkan dana desa ke tengah masyarakat (Ichwan, 2019).

Pelaksanaan PKTD di tingkat desa melibatkan beberapa pihak meliputi kepala desa sebagai penanggungjawab dan tim pelaksana kegiatan desa (TPKD) serta bendahara sebagai pelaksana (Hakim Rizal, 2021). Sedangkan BPD sebagai pengawas eksternal dan pekerja teknisnya terdiri dari pengawas serta tenaga kerja seperti tukang, asisten tukang dan pekerja jasa lainnya yang dipilih dari masyarakat marginal di desa, untuk tingkat Kabupaten/Kota juga melibatkan kepala Bappeda dan DPMD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penanggung jawab yang berwenang melakukan monev dan koordinasi (Kuswanto et al., 2020). Durasi pengerjaan proyek PKTD dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini 1 orang pekerja akan bekerja selama 8 jam sehari (Sunardi Rosa, 2020).

Proses pengerjaan pembangunan proyek program PKTD sendiri cenderung lebih banyak mengunakan tenaga manusia. Program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang berkaitan dengan perekonomian di Desa gonggang (Sagajoka et al., 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwasanya Desa Gonggang yang terletak di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan memiliki potensial lahan yang cukup luas dan cocok digunakan untuk bertani. Hal tersebut menjadi potensi sumber daya alam yang sangat baik apabila di Kelola dengan benar.

Gambar 1. 1 Diagram Luas Tanah Menurut Penggunaannya



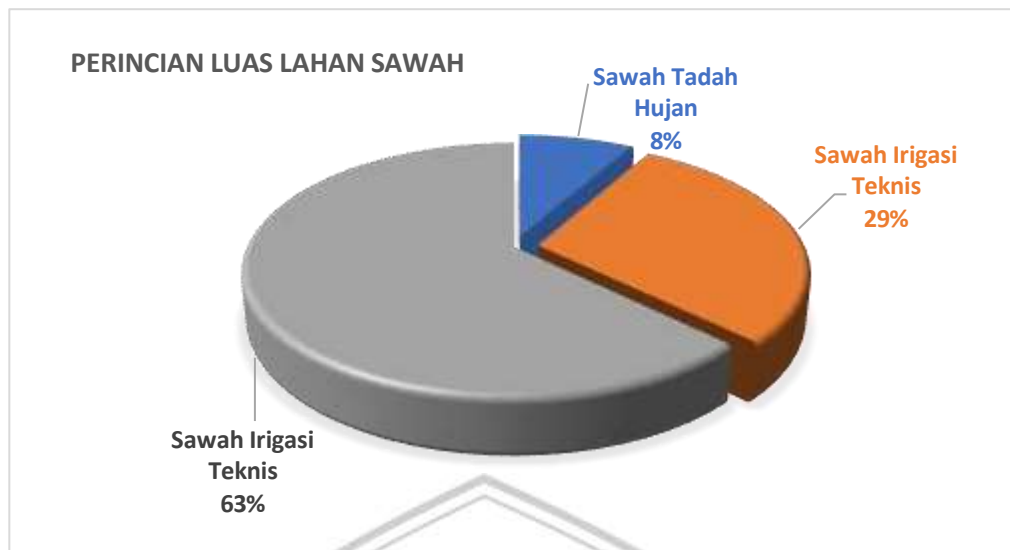
*Sumber: Di olah oleh peneliti*

Berdasarkan data yang didapat dari RKPDes mengenai Desa Gonggang yaitu:

Luas tanah di wilayah Desa Gonggang dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang diatas untuk memudahkan visualisasi. Kategori penggunaan tanah yang meliputi:

1. Tanah Pertanian Sawah, dengan luas sebesar 182,00 hektare, menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung kegiatan agraris.
2. Tegal, Kebun, dan Pekarangan, mencakup area seluas 339,78 hektare, yang sering digunakan untuk aktivitas berkebun atau pekarangan rumah.
3. Hutan Negara, merupakan kategori terbesar dengan luas mencapai 520,00 hektare, yang berfungsi sebagai kawasan konservasi atau pelindung ekosistem.
4. Rumah dan Bangunan, memiliki luas 23,42 hektare, digunakan untuk pemukiman dan bangunan fasilitas lainnya.
5. Lainnya, termasuk area yang tidak masuk ke dalam kategori utama, dengan luas 22,02 hektare.

Secara keseluruhan, total luas tanah dalam wilayah Desa Gonggang seluas 1.086,92 hektare. Diagram tersebut batang tersebut digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan tiap kategori tersebut secara jelas.



Gambar 1. 2 Diagram Luas lahan sawah

*Sumber: Di olah oleh peneliti*

Berikut penjelasan diagram diatas mengenai perincian luas lahan sawah, luas lahan sawah di Desa Gonggang tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis irigasinya sebagai berikut:

1. Sawah irigasi teknis memiliki luas sebesar 53,00 hektar. Jenis sawah ini mendapatkan pasokan air secara teratur dan sistematis melalui jaringan irigasi yang dirancang khusus, sehingga produktivitasnya cenderung lebih stabil.
2. Sawah irigasi sederhana mencakup area seluas 114,00 hektar. Sawah ini memanfaatkan saluran air sederhana dengan pengelolaan yang kurang intensif dibandingkan irigasi teknis, namun tetap mendukung pengairan bagi tanaman padi.
3. Sawah tadah hujan memiliki luas 15,00 hektar. Jenis sawah ini hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan irigasinya, sehingga hasil panen sangat bergantung pada curah hujan.

Dengan demikian, total luas lahan sawah di wilayah Desa Gonggang terdapat seluas 182,00 hektar.

Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti tangguh dan tetap tumbuh positif dan menjadi bantalan perekonomian Indonesia, namun terus

berupaya untuk tumbuh sehingga terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional (Rachmawati et al., 2023). Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan oleh pemerintah termasuk sektor pertanian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penyedia pangan bagi 273 juta jiwa masyarakat di Indonesia (Harivarman, 2022).

Sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas (Sudrajat & MAULIDAH, 2024). Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan (RAHMANSYAH, 2025).

perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi tercermin dari perbaikan capaian indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya, inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat rasio gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Firmansyah Fendy et al., 2021).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan, termasuk kelompok tani (Yahya & Herman, 2024). Dalam hal ini Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dalam sistem hierarki pemerintahan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa, termasuk membangun masyarakat petani (Novanto & Wibawani, 2023).

Perekonomian di tingkat desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama (Setiawan & Megawati, 2022). Namun, potensi ekonomi desa sering kali belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertanian (Dian & Ma'ruf, 2019). Padahal,

pertanian adalah sektor kunci yang dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan ekonomi lokal jika dikelola dengan baik (R. D. Puspitasari, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Di Desa Gonggang Magetan?
2. Apa Hambatan dari Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Di Desa Gonggang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Di Desa Gonggang Magetan
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Di Desa Gonggang Magetan

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para masyarakat khususnya pemerintah desa dan petani mengenai bagaimana memberikan kontribusi terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Di Desa Gonggang Magetan”. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama petani melalui pelaksanaan atau pun pemanfaatan dari program PKTD (Padat Karya Tunai Desa) tersebut. Selain itu penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai strategi pengembangan ekonomi lokal para masyarakat desa melalui program-program pemerintah yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemerintah desa. Kajian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan

konsep atau model pelaksanaan program PKTD yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan pedesaan.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### 1. Bagi Pemerintahan

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang efektivitas dari sebuah program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam meningkatkan perekonomian petani sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program di masa mendatang.

##### 2. Bagi masyarakat atau petani

Adapun untuk kedepannya dapat memberikan wawasan yang komprehensif kepada petani di Desa Gonggang mengenai manfaat langsung baik yang bersifat langsung seperti peningkatan pendapatan melalui program PKTD maupun tidak langsung dari program PKTD seperti peningkatan keterampilan, akses peluang kerja, dan perbaikan infrastruktur desa. sehingga dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan desa.

##### 3. Bagi Peneliti lain

Diharapkan kedepannya sebagaimana temuan dari riset ini dapat memberikan dampak yang bermanfaat, baik berupa rujukan literatur yang terkait tema dan dapat dijadikan bahan untuk evaluasi dan refrensi kedepannya.

#### **E. Definisi Konseptual**

##### **1. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan Program adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut *Majone* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Sedangkan menurut *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

## **2. PKTD (Padat Karya Tunai Desa)**

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ini memiliki 6 prinsip yaitu

1. Inklusif, melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
2. Partisipatif, dari, oleh, dan untuk masyarakat desa yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
3. Transparan dan akuntabel, mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, maupun administrative kepada semua pihak
4. Efektif, kegiatan yang prioritas berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan dan pelestarian berkelanjutan.
5. Swadaya dan swaloka, mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
6. Upah kerja, penentuan upah kerja berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengacu pada peraturan kepala daerah.

Awalnya pada tahun 2018, kegiatan Padat Karya Tunai Desa atau yang di singkat menjadi PKTD dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pedesaan, pemerintah fokus pada program pembangunan desa melalui skema kerja system padat karya dengan upah secara tunai untuk memunculkan lapangan kerja serta memberi peningkatan daya beli

masyarakat pedesaan. Program ini disokong oleh berbagai lembaga serta kementerian yang turut serta berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan presiden. Tidak sekedar di level pusat, daerah turut didorong untuk menjalankan hal serupa baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten dengan membangun wilayahnya sesuai dengan prinsip padat karya sehingga bisa memberi peningkatan kemakmuran penduduk setempat.

Sistem penerapan padat karya adalah aktivitas yang memakai sumber daya alam, tenaga kerja, serta keterampilan lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi stunting untuk memberdayakan masyarakat marginal/miskin dengan produktivitas tinggi. Tujuan dari Kerja Padat Tunai ialah memberi pedoman kerja untuk membantu pengurus serta pelaksana Satker Desa memahami serta menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik. Kesadaran yang sama mengenai mekanisme untuk menjalankan pekerjaan padat tunai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemantauan. Ini memungkinkan untuk memenuhi tujuan aktivitas dari program PKTD.

### **3. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah struktur pemerintahan yang beroperasi di tingkat desa, yang merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan desa dan memiliki masa jabatan enam tahun, yang dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu.

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Mereka memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memanfaatkan potensi lokal, dan menjaga lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah desa juga bertugas untuk mengelola keuangan desa, termasuk penggunaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan nasional dan daerah di tingkat lokal, serta menjadi penghubung langsung antara masyarakat desa dengan pemerintah yang lebih tinggi.

#### **4. Perekonomian**

Menurut Adam Smith Ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ekonomi, menurut Adam Smith, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, dengan penekanan pada konsep 'tangan tak terlihat' yang menggambarkan mekanisme pasar di mana tindakan individu yang mencari keuntungan secara otomatis mengarah pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk

pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

## **5. Petani**

Menurut Anwas (1992), Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu, sedangkan Pengertian Pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Sedangkan Menurut Van Aarsten (1953), Pertanian adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang akan dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang akan diamati. Peneliti harus menentukan dan memilih definisi operasional yang paling relevan dengan variabel yang akan diteliti. Menurut teori George C. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi atau pelaksanaan program dipengaruhi oleh empat variable, yaitu.

## **1. Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa Gonggang Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Di**

### **a. Komunikasi**

merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah pelaksanaan program yang mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dari sebuah pelaksanaan sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi. Sebuah komunikasi harus akurat dan harus mudah dimengerti secara cermat oleh pelaksana. Komunikasi dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh suatu peraturan-peraturan program yang telah disampaikan secara jelas. Komunikasi juga merupakan alat untuk menyampaikan perintah-perintah, arahan dan informasi lainnya. Dalam tipe komunikasi yang diajukan oleh Edward III, terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi.

- 1) Transmisi, Hal penting pertama bagi implementasi kebijakan adalah sebagai implementor mereka harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti serta dipahami oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat oleh pemerintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana seperti yang diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan mereka. Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka

mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan.

- 2) Kejelasan, apabila sebuah program ingin dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan bukan hanya harus bisa dipahami namun juga harus jelas. Karena apabila petunjuk pelaksanaan tidak jelas maka pelaksana akan kebingungan tentang apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Ada faktor lain yang menyebabkan ketidakjelasan dalam melakukan pelaksanaan bisa dikarenakan ada pihak-pihak yang mungkin tidak setuju dengan pelaksanaan tersebut. Ketidakjelasan dalam komunikasi juga bisa terjadi karena apabila ada pihak-pihak yang memiliki keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada suatu program. Pandangan yang mungkin cukup jauh berbeda dari pandangan yang seharusnya dijadikan untuk acuan.
- 3) Konsistensi, konsistensi mengandung sebuah makna bahwasanya pelaksanaan atau pengimplementasian akan berjalan dengan baik apabila perintah pelaksanaan berjalan dengan konsisten dan jelas. Konsistensi ini bisa terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Oleh karena itu sangat pentingnya pentingnya perintah dari pelaksana berjalan dengan konsisten.

#### **b. Sumber daya**

Sumber daya untuk tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan program padat karya tunai desa ini adalah sumber daya yang dibagi kedalam 4 bagian yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya kewenangan. Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pelaksanaan program. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan sarana dan prasarana-sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai

dengan apa yang diharapkan. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya yaitu.

- 1) Staf, Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Informasi, informasi menjadi salah satu sumber penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan maupun program, Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan atau program tersebut.
- 3) Wewenang, Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu program.
- 4) Sarana dan prasarana, Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi

terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

### **c. Disposisi**

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegaranegara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III yaitu.

- 1) Pengangkatan Birokrat, dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil atau anggota pelaksana haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- 2) Insentif, dalam artian memanipulasi insentif dengan meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin menjadi faktor pendukung yang menghalangi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan maupun program dengan baik. Ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

### **d. Struktur birokrasi**

Struktur dalam birokrasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, struktur birokrasi menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan agar proses pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hal

ini, keberhasilan suatu program atau kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu, faktor internal dan eksternal.

- 1) Faktor internal, berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang merupakan sistem alur kerja dalam pelaksanaan suatu program. SOP berperan sebagai pedoman dasar yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.
- 2) faktor eksternal, berkaitan dengan fragmentasi, yakni berbagai tekanan yang berasal dari luar lingkungan birokrasi. Tekanan ini dapat muncul dari pihak legislatif dalam bentuk komite pengawas, maupun dari berbagai faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi jalannya kebijakan.

Model implementasi Edward diastis dapat digunakan untuk menggambarkan implementasi program diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi. Aplikasi model ini dalam penelitian “Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Di Desa Gonggang Magetan” adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Variabel Model Edward III

<b>Aspek</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program atau kebijakan?</li> <li>b. Bagaimana sosialisasi program atau kebijakan efektif dijalankan?               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode yang digunakan</li> <li>- Intensitas komunikasi</li> </ul> </li> </ol>
Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan Implementor               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pendidikan</li> <li>- Tingkat Pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program</li> <li>- Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan</li> </ul> </li> <li>b. Ketersediaan dana               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berapa dana yang dialokasikan</li> <li>- Prediksi kekuatan dana dan besar biaya untuk pelaksanaan program/kebijakan</li> </ul> </li> </ol>
Deposisi	Karakter pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat komitmen dan kejujuran (dapat diukur</li> </ul>

	<p>dengan konsistensi antara pelaksana kegiatan guideline yang telah ditetapkan). Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat demokratis, dapat diukur dengan mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program</li> </ul>
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami</li> <li>b. Struktur organisasi, Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.</li> </ul>

*Sumber:*

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/42250/37388>

Kesimpulan tentang konsep implemementasi program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, agar hal tersebut dapat berjalan dengan ter-sistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia. Jenis penelitian ini lebih mengutamakan aspek deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti cenderung menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, studi kasus, analisis isi, dan teknik lainnya untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif seringkali berupa narasi, citra, atau kutipan yang menggambarkan pengalaman, persepsi, dan interpretasi subjektif dari partisipan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, di mana peneliti mencoba memahami pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang terkumpul. Tujuan utama dari

penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam, menjelaskan kompleksitas, dan mengungkap nuansa yang mungkin tidak dapat diukur secara langsung dengan angka atau statistik. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam bidang-bidang seperti sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk menggali wawasan yang lebih dalam tentang aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks dan bervariasi.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

### a. Data primer

#### 1) Hasil wawancara

- Kutipan dari wawancara dengan bendahara Desa Gonggang mengenai program PKTD yang ada di Desa Gonggang
- Kutipan wawancara dengan bapak Choirul selaku penanggung jawab dari Program PKTD di Desa Gonggang

#### 2) Dokumen Internal

SPJ dari Program PKTD (Padat Karya Tunai Desa) tahun 2023 hingga 2024 yang peneliti dapatkan dari penanggung jawab program PKTD Desa Gonggang

### b. Data sekunder

Diperoleh dari dokumen, arsip, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- Peraturan Pemerintah Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 1 angka 15

#### **4. Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan terhitung dari bulan juli sampai oktober.

#### **5. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan hal terpenting guna mencapai keberhasilan penelitian yang baik dan benar. pengumpulan data yang dimaksud yaitu menggunakan teknik observasi (pengamatan), wawancara, serta dokumentasi.

##### **a) Observasi**

Observasi kaitannya dengan penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang ada di Desa.

##### **b) Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pemahaman informan terkait pelaksanaan program PKTD (Padat Karya Tunai Desa). Langkah awal dari teknik wawancara ini peneliti menyusun panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait bagaimana pelaksanaan program PKTD tersebut, serta faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya, peneliti memilih informan yang relevan dengan fokus penelitian, seperti penanggung jawab program dan masyarakat yang terlibat sebagai petani atau sasaran program. Alasan mengapa penulis hanya akan mewawancarai penanggung jawab dikarenakan hanya penanggung jawab yang dapat memberikan informasi melalui wawancara dengan peneliti. Kemudian wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, tergantung pada ketersediaan dan kenyamanan informan. Selama wawancara, peneliti mencatat jawaban informan dan melakukan perekaman untuk memastikan keakuratan data.

Peneliti juga melakukan dokumentasi visual dengan mengambil foto yang akan dijadikan sebagai lampiran.

c) Dokumentasi

Data berupa dokumentasi dapat digunakan untuk menggali informasi dalam pendukung penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber, sumber tersebut terdiri dari dokumen dan catatan. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memperoleh data secara sistematis melalui proses pengumpulan data, yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumen resmi yang didapatkan dari instansi dinas. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Penyajian Data Penyajian Data Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagian adalah beberapa bentuk penyajiannya. Tujuannya adalah agar orang lebih mudah membaca dan membuat kesimpulan. Selama proses ini, para peneliti mengelompokkan objek yang mirip menjadi kategori, atau kelompok satu, dua, tiga, dan seterusnya. Selama proses ini, data dikategorikan berdasarkan teori yang tersedia.

c) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.